RABU KLIWON, 12 OKTOBER 2016
(10 SURA 1950)

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 2

Baru 6,55% Insinyur Bersertifikat Keahlian

YOGYA (KR) - Lima tahun mendatang, ditargetkan 10% dari insinyur atau pekerja konstruksi di Indonesia sudah memiliki sertifikat keahlian. Saat ini, dari 7,3 juta orang yang bekerja di bidang konstruksi, hanya 6,55% yang telah bersertifikat. Rincian 10 ribu tenaga ahli, 40 ribu pekerja yang juga berperan sebagai asesor, 10 ribu asesor konstruksi, dan 700 ribu tenaga teknik.

Hal ini diungkapkan Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KSP-PUPR), RM Dudi Suryo Bintoro dalam Pembukaan Pelatihan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Asessor di Hotel Arjuna, Selasa (11/10). Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Kementerian PUPR RI dengan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penandatanganan dilakukan RM Dudi Suryo Bintoro dengan Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Muh Sayuti MPd MEd.

Sebagaimana diatur UU, menurut Dudi, pekerja konstruksi di Indonesia harus memiliki sertifikat keahlian. Jika para pekerja konstruksi tersebut tidak memiliki sertifikat keahlian maka akan dikenakan sanksi administratif bahkan hingga sanksi berupa pemberhentian proyek.

"Karena itulah, kami menargetkan 5 tahun yang akan datang dari jumlah 6,55% pekerja konstruksi yang telah bersertifikat bisa bertambah jumlahnya menjadi 10%," tandasnya.

Dikatakan, kerja sama dengan Diktilitbang PP Muhammadiyah sangat strategis karena menaungi 24 Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang memiliki program studi Teknik Sipil, dua PTM di antaranya bahkan menyumbangkan jumlah mahasiswa yang cukup banyak yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Sedangkan Muh Sayuti MPd MEd menjelaskan penandatanganan MoU itu juga sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang jasa konstruksi.

"Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pengembangan materi uji kompetensi (MUK) dan tempat uji kompetensi (TUK). Selain peningkatan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi, pemetaan database lulusan dan lainnya," tuturnya. (Fsy)-m